KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah usulkan dwi kewarganegaraan terbatas
Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Usulkan Dwi Kewarganegaraan Terbatas

Pemerintah mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan guna memberikan dwi kewarganegaraan secara terbatas bagi individu yang memiliki kemampuan istimewa untuk kepentingan nasional. Wacana ini menuai tanggapan beragam.

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran Pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," ujar Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Prabowo, talenta Indonesia yang berkarier dan menetap di berbagai penjuru dunia berpeluang tetap mempertahankan ikatan kewarganegaraan dengan Tanah Air.

Presiden menyoroti besarnya potensi diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Di antara mereka terdapat individu dengan keahlian, pengalaman, dan jejaring internasional yang dinilai dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk atlet.

"Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola profesional kelas dunia," jelas Presiden.

Sebagian dari mereka terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian di luar negeri. "Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya dan ikatan mereka terhadap Tanah Air," imbuhnya.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan diaspora dengan kebutuhan nasional. Melalui perubahan undang-undang yang akan diajukan kepada DPR RI, Pemerintah ingin membuka ruang dwi kewarganegaraan secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dinilai mampu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.

Pemerintah juga berencana menerapkan uji integritas serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi individu yang memperoleh status tersebut. Aspek keamanan dan kepentingan negara juga menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta pelindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara," tegas Prabowo.

Usulan tersebut mengundang beragam komentar dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mendukung penuh usulan tersebut.

Menurut dia, negara tidak boleh lagi memaksa anak-anak bangsa yang hebat untuk memelihara dilema antara mengejar karier internasional dan kecintaan mereka pada Tanah Air. "Ini bukti kepedulian negara," katanya.

Pandangan berbeda datang dari Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah. Menurutnya, rencana untuk merevisi aturan dan memberikan dwi kewarganegaraan harus dilakukan secara hati-hati. "Jangan sampai Indonesia dimanfaatkan bagi negara lain," ujarnya.

Untuk mengulas lebih detail pandangan Teuku Rezasyah dan Sugiat Santoso terkait usulan pemberian dwi kewarganegaraan terbatas, berikut wawancaranya.

TEUKU REZASYAH,
Dosen Hubungan Internasional, President University

Harus Hati-hati Karena Menyangkut Kedaulatan

> Orang yang mempunyai dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda belum tentu tulus untuk membela Indonesia. Sebab, tidak mungkin ada satu warga yang mengabdi untuk dua negara.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap rencana Presiden yang meminta agar UU Kewarganegaraan diubah atau direvisi?

Ini urusannya tidak main-main, jika memang mau merevisi UU Kewarganegaraan. Makanya, kita harus hati-hati karena menyangkut kedaulatan negara Indonesia. Kita ingin ketika menjadi WNI itu secara kaffah. Tidak setengah-setengah.

Kenapa perlu ada kehati-hatian?

Begini. Orang yang mempunyai dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda belum tentu tulus untuk membela Indonesia. Sebab, tidak mungkin ada satu warga yang mengabdi untuk dua negara.

Selain itu, ada kekhawatiran jika negara lain membutuhkan Indonesia hanya untuk dijadikan kuda Troya. Mereka sengaja menyusupkan warganya untuk menjadi WNI, belajar nuklir, astronomi, persenjataan, mengumpulkan berbagai sumber, serta menjalin relasi dengan Indonesia. Lalu pulang lagi ke negara asalnya.

Ada contohnya?

Ada pengalaman ahli nuklir Abdul Qadeer Khan kembali ke Pakistan setelah sekian tahun menetap di Eropa. Padahal, Khan hidup puluhan tahun di Eropa, belajar mengenai nuklir, dan kemudian kembali ke negara asalnya.

Contoh lain, saat ini di Bali ada warga negara Israel yang menetap. Ini membahayakan negara kita. Bisa jadi mereka yang mempunyai dwi kewarganegaraan menjadi mata-mata bagi negara lain.

Jadi, menurut Anda, revisi UU Kewarganegaraan terbatas tidak perlu?

Saya pikir tidak perlu. Indonesia tidak membutuhkan dwi kewarganegaraan karena potensi anak Indonesia luar biasa. Justru dengan adanya dwi kewarganegaraan, Indonesia seperti bangsa pengemis. Minta-minta.

Kalaupun Pemerintah dan DPR *keukeuh* membahas dan merevisi UU Kewarganegaraan, bagaimana?

Yang pasti harus dijelaskan kepada masyarakat mengenai urgensi dan manfaat dari revisi ini. Jangan sampai pembahasannya tidak transparan.

Selain itu, perlu diuji kelayakan dan harus dipertanggungjawabkan. Pembahasannya dilakukan oleh DPR serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. ■ REN

SUGIAT SANTOSO,
Wakil Ketua Komisi XIII DPR

Prosesnya Dilakukan Selektif Dan Spesifik

> Negara tidak boleh lagi memaksa anak-anak bangsa yang hebat untuk memelihara dilema antara mengejar karier internasional dan kecintaan mereka pada Tanah Air.

Pemerintah ingin merevisi UU Kewarganegaraan secara terbatas. Bagaimana pandangan Anda?

Usulan terkait rencana penerapan dwi kewarganegaraan ini lahir dari kepedulian Presiden Prabowo terhadap jutaan diaspora Indonesia, seperti pakar nuklir, insinyur, dokter, hingga atlet berprestasi yang selama ini terpaksa melepas status WNI semata-mata karena tuntutan karier atau kewajiban legal di luar negeri.

Negara tidak boleh lagi memaksa anak-anak bangsa yang hebat untuk memelihara dilema antara mengejar karier internasional dan kecintaan mereka pada Tanah Air.

Berarti prosesnya akan selektif, ya?

Kami perlu menegaskan usulan Pak Prabowo bersifat sangat selektif dan spesifik untuk talenta tertentu yang betul-betul dibutuhkan untuk percepatan pembangunan nasional.

Pemerintah tentu akan merancang regulasi dengan mekanisme *screening* ketat, uji integritas, serta penentuan kewajiban yang jelas tanpa mengorbankan kedaulatan atau keamanan nasional.

Kenapa Pemerintah ingin sekali dengan program ini?

Banyak negara berkembang memenangi kompetisi global karena berhasil menarik kembali diaspora mereka. Kebijakan ini adalah langkah strategis agar talenta top dunia berdarah Indonesia dapat berkontribusi langsung pada industri strategis nasional, seperti nuklir, riset medis, teknologi mutakhir, dan olahraga.

Bagaimana dengan adanya kritik dari berbagai pihak?

Kami menghormati pandangan kritis dari para akademisi hukum internasional. Justru karena itulah usulan ini dibawa ke ranah legislatif, yakni DPR, untuk digodok bersama.

Seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan partisipatif serta mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.

Bagaimana menjelaskan jika dwi kewarganegaraan ini mengganggu kedaulatan?

Bapak Presiden Prabowo tidak sedang membuka pintu kewarganegaraan ganda secara luas tanpa aturan. Beliau ingin memberi jalan bagi anak bangsa yang jenius dan berprestasi di luar negeri agar tetap bisa pulang dan membangun Indonesia tanpa kehilangan ikatan hukum dengan Tanah Airnya. ■ REN